# PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ZAHRA FONNA**
**NIM : 1805906030006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**
**FAKULTAS EKONOMI**
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**
**MEULABOH, ACEH BARAT**
**2022**

# PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

**OLEH**

**ZAHRA FONNA**
**NIM : 1805906030006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**
**FAKULTAS EKONOMI**
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**
**MEULABOH, ACEH BARAT**
**2022**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**
**FAKULTAS EKONOMI**
**MEULABOH, ACEH BARAT**
**Website : www.utu.ac.id Email : fekon_utu@yahoo.ac.id** Telp (0655) 7023552

Meulaboh, 01 Desember 2022

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : ZAHRA FONNA
Nim : 1805906030006

Dengan judul : **PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

*Yang diajukan* untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan :

Pembimbing

**Lilis Marlina, SE., M.Si**
**NIP.198304042010032003**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

**Prof. Dr. T. Zulham, SE., M.Si**
**NIP.196002121989031003**

Ketua Program Studi Akuntansi

**Ika Rahmadani, SE., M.Si.Ak.**
**NIP.198805132022032003**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**
**FAKULTAS EKONOMI**
**MEULABOH, ACEH BARAT**
**Website : www.utu.ac.id Email : fekon_utu@yahoo.ac.id** Telp (0655) 7023552

Meulaboh, 01 Desember 2022

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Strata 1(S1)

## LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : ZAHRA FONNA
Nim : 1805906030006

Dengan judul : **PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada Tanggal 01 Desember 2022.

Menyetujui
Komisi Ujian

| | | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | : Lilis Marlina, SE., M.Si | ..... |
| 2. Sekretaris | : Ika Rahmadani, SE., M.Si.Ak | ..... |
| 3. Anggota | : Cici Darmayanti, SE., M.Si | ..... |

Mengetahui :
Ketua Program Studi Akuntansi

**Ika Rahmadani, SE., M.Si.Ak.**
**NIP.198805132022032003**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAHRA FONNA

Nim : 1805906030006

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 01 Desember 2022

Yang Menyatakan

**ZAHRA FONNA**
**1805906030006**

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang paling hebat di hidup saya dan paling berjasa dalam perjalanan hidup saya sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yaitu kedua orang tua saya. Mamak saya Tihawa dan Ayah saya Andika. Bukan aku yang hebat tapi do'a kalian yang kuat. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa mamak dan ayah serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mamak dan ayah membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Terima kasih karena selalu ada untuk anakmu. Saya berjanji tidak akan membiarkan perjuangan kalian sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk mamak dan ayah.*

*Teruntuk adik saya Kesya Ul Askiya, terimakasih karena tidak hentinya kau memberi ku semangat saat mengerjakan skripsi. Kakak berharap kelak bisa menjadi alas untukmu berpijak nanti.*

*Skripsi ini juga merupakan persembahan istimewa untuk orang terkasih Ratno Sri Yugiat. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Kamu selalu menunjukkan kepada saya cara yang benar dan menghibur saya pada saat yang kritis. Betapa beruntungnya aku bertemu kamu di jalan hidupku.*

*Teruntuk sahabat saya Sapna Julita Roza dan Elsi Wira Elfita. Terimakasih atas bantuan dan kerja samanya selama ini, jalan bareng, makan bareng, ingat sahabat Bakso Asahan merupakan bakso favorit langganan kita. Semoga keakraban di kita selalu terjaga. Sahabat selamanya.*

*Terakhir dan tidak kalah penting, saya ingin berterima kasih kepada saya. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena percaya pada saya. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena telah melakukan semua kerja keras ini. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak memiliki hari libur. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak pernah berhenti. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena selalu menjadi pemberi dan mencoba memberi lebih dari yang saya terima. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena mencoba melakukan lebih banyak yang benar daripada yang salah .Saya berterima kasih kepada saya karena telah menjadi saya setiap saat.*

***Zahra Fonna***

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Zahra Fonna lahir di Desa Nibong, Aceh Utara pada Tanggal 22 Oktober 2000 merupakan anak ke 1 dari 2 brsaudara, dari Pasangan Bapak Andika dan Ibu Tihawa, penulis berkembang di Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan, penulis menempuh Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SDN 3 Nibong dan lulus pada tahun 2012, kemudian terdaftar sebagai siswi di MTsN 7 Aceh Utara dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 2015 di SMA Negeri 1 Tanah Luas dan lulus tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Teuku Umar dan menyelesaikan studi di tahun 2022 pada bulan Desember.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Teuku Umar, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahra Fonna
Nim : 1805906030006
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Non-eksklusif Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalih media/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Meulaboh, 01 Desember 2022
Yang menyatakan

**Zahra Fonna**
**Nim : 1805906030006**

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdullillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara**. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Akuntasi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Dalam penulisan skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
2. Prof. Dr. T. Zulham, SE.M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
3. Ibu Ika Rahmadani, SE.M.Si.Ak selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
4. Ibu Sari Maulida Vonna, SE., M.Si. Ak, selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

5. Ibu Lilis Marlina, S.E., M.Si, selaku Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan Skripsi ini.
6. Penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ayahanda Andika, Ibunda Tihawa dan Adik penulis Kesya Ul Askiya yang selalu memberikan do'a, bantuan dan dukungan material dan moral dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Bapak/Ibu di Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Utara yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
8. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani peneliti baik di waktu susah maupun senang.
9. Semua pihak yang tidak biasa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Alue Peunyareng, 01 Desember 2022

**Zahra Fonna**

# *ABSTRACT*

*The purpose of this study was to determine the effect of implementing performance-based budgeting on the performance accountability of government agencies in North Aceh District. The population in this study were the North Aceh District Working Units (SKPK), totaling 60 SKPK. The sample in this study were 19 SKPK in North Aceh District. The sampling technique in this study used a convenience sampling technique, and obtained the final number of respondents as many as 38 samples. The research design uses quantitative research methods on SKPK in North Aceh District. Data collection techniques using a questionnaire in the form of a questionnaire. The results of the study show that the variable Performance-Based Budget has a significant effect on Performance Accountability. Based on the results of the linear regression test, the X coefficient is 7.301, then the calculated t value is greater than the table, namely 6.428 > 2.028, while the Sig. Smaller than a, namely 0.000 <0.05. Thus, the hypothesis Ho is rejected and the H1 hypothesis is accepted. The results of the test for the coefficient of determination (R2) show that the influence or contribution of the independent variables to the dependent variable is 96.9% and the remaining 3.1% is influenced by other factors or variables not examined in this study.*



***Keywords****: Performance Based Budgeting, Performance Accountability*

# ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Utara yang berjumlah 60 SKPK. Sampel dalam penelitian ini yaitu 19 SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling,* dan memperoleh jumlah responden akhir sebanyak 38 sampel. Desain penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif pada SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan angket berupa kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Berdasarkan hasil uji regresi linear diperoleh koefisien X sebesar 7,301 kemudian nilai t hitung lebih besar dari tabel yaitu 6,428 > 2,028 sedangkan nilai Sig. lebih kecil dari a yaitu 0,000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis Ho ditolak dan Hipotesis H1 terima. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa pengaruh atau kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 96,9% dan sisanya sebesar 3,1% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci**: Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja

## DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---|
| **HALAMAN JUDUL** | **i** |
| **LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI** | **ii** |
| **LEMBARAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN** | **iii** |
| **PERNYATAAN** | **iv** |
| **DAFTAR RIWAYAT HIDUP** | **v** |
| **LEMBARAN PERSEMBAHAN** | **vi** |
| **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS** | **vii** |
| **KATA PENGANTAR** | **viii** |
| ***ABSTRACT*** | **x** |
| **ABSTRAK** | **xi** |
| **DAFTAR ISI** | **xii** |
| **DAFTAR TABEL** | **xiv** |
| **DAFTAR GAMBAR** | **v** |
| **DAFTAR LAMPIRAN** | **xvi** |
| **BAB I PENDAHULUAN** | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Manfaat Praktis | 6 |
| 1.4.2 Manfaat Teoritis | 6 |
| **BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS** | 7 |
| 2.1 Kajian Pustaka | 7 |
| 2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah | 7 |
| 2.1.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 10 |
| 2.1.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 11 |
| 2.2 Pengertian Anggaran | 12 |
| 2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja | 13 |
| 2.1.2 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja | 14 |
| 2.1.3 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja | 14 |
| 2.1.4 Kelebihan Anggaran Berbasis Kinerja | 16 |
| 2.3 Penelitiaan Terdahulu | 20 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran | 22 |
| 2.4.1 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja | 23 |
| 2.5 Hipotesis Penelitian | 24 |

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 25
3.1 Desain Penelitian ..... 25
3.2 Populasi dan Sampel ..... 26
3.3 Sumber dan Teknik Analisis Data ..... 28
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel..... 30
3.5 Metode Analisis Data ..... 31
3.5.1 Uji Asumsi Klasik ..... 32
3.5.2 Uji Hipotesis ..... 33

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**..... 35
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ..... 35
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Utara ..... 35
4.2. Karateristik Responden ..... 35
4.3. Hasil Penelitian ..... 38
4.3.1 Analisis Data ..... 35
4.3 Pembahasan ..... 45

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN** ..... 47
5.1 Kesimpulan..... 47
5.2 Saran ..... 47
**DAFTAR PUS**TAKA ..... 49

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu..... 21
Tabel 3.1 Sampel SKPK ..... 27
Tabel 3.2 Tabel Operasional Variabel ..... 30
Tabel 4.1 Uji Validitas Anggaran Berbasis Kinerja..... 39
Tabel 4.2 Uji Validitas Angkuntanbilitas Kinerja..... 39
Tabel 4.3 Uji Reabilitas Anggaran Berbasis Kinerja..... 39
Tabel 4.4 Uji Reabilitas Angkuntanbilitas Kinerja..... 40
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif..... 40
Tabel 4.6 Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov*)..... 41
Tabel 4.7 Uji Glejser..... 43
Tabel 4.8 Hasil Uji t..... .... 44
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi..... .... 45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... 24

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 kuisioner..... 52
Lampiran 2 Tabulasi Data..... 58
Lampiran 3 Hasil SPSS..... 62

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, karena akuntanbilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, terkait dengan pertanggung jawaban atas sumber dana publik. Disamping itu keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. (Bastian, 2010: 88).

Sekarang ini dalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas (Bahri, 2012). Salah satu unsur reformasi sektor publik adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota arahan yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sulisiana, 2013).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Utara menunjukkan bahwa realisasi capaian indikator dari tujuan pertama yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah yaitu indeks Reformasi Birokrasi diperoleh realisasi

40,40 dari Target 51 sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 79,22%. Sedangkan tingkat capaian berdasarkan target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dengan indeks 55 memperoleh capaian sebesar 73,45%. Pada tahun 2020 nilai indeks reformasi birokrasi masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 40,40. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB memperoleh predikat CC dengan nilai 55,75. Hal yang menyebabkan lambatnya pencapaian target untuk indikator ini, karena kurang kokohnya komitmen para pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini terlihat dengan belum adanya tindak lanjut dari hasil pelaporan LAKIP dan masih ada indikator yang belum berorientasi hasil dan belum menampakan garis merah antar kegiatan dengan sasaran. Masih ada sebagian kecil Perangkat Kabupaten yang menyusun LAKIP belum sesuai format laporan dan belum tepat waktu. Rendahnya predikat Lakip ini karena masih ada SKPD yang belum maksimal dalam hal pencapaian target kinerja (LAKIP Aceh Utara 2021).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*). Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan

seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Aceh Utara yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (Endrayani, at all, 2014).

Peningkatan akuntabilitas ini dapat tercapai apabila pemerintah daerah telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitasi masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (Bahri, 2012)

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (BPPKPD,2022). Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah berharap anggaran digunakan

secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. (Endrayani, at all, 2014).

Kemenkeu (2014) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, berfungsi pula sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas public. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Hasil penelitian dari Syaripuddin, Basri (2017) menunjukkan bahwa Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD kota Kendari dan evalusai kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang artinya bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas publiknya. Hasil penelitian Endrayani, at all, (2014) memperlihatkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Basri (2017) meneliti "Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik

Pada Instansi Pemerintah (studi padabadan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kendari)". Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di instansi pemerintah Aceh Utara sedangkan Syaripuddin, sutriana Basri pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kendari. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada SKPD Aceh Utara dikarenakan kegiatan SKPD secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga merupakan satuan kerja pemerintah yang menyusun, menggunakan, dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: bagaimana pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Utara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Utara

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis adalah Hasil penelitian ini dapat menambah bukti empiris dari penelitian yang terkait dengan pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi kalangan praktis hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan bagi sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja
2. Bagi masyarakat Aceh penelitian ini dapat di jadikan masyarakat untuk menilai kinerja instansi dalam mewujudkan akuntanbilitas pengeluaran keuangan daerah.
3. Bagi Akademisi Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dan tambahan literatur bagi mahasiswaa yang akan melakukan penelitian dengan topic serupa di masa yang akan datang.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengertian Akuntabilitas Publik Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris "*accountability*" yang berarti pertangungjawaban. Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Menurut Halim (2012), akuntabilitas publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya. Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang sebagai jawaban ketika ada permintaan dari pihak lain tentang pencapaian sesuatu dan pelaporan balik (memberitahukan) hasil pencapaian tersebut dengan menjelaskan bagaimana menyelenggarakan atau melaksanakannya. Tampak adanya kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan dan hasil akhir yang ingin diketahui. Hal



7

tersebut menunjukkan dapat diketahui bahwa apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan sampai pada tingkat mana penyelesaian pekerjaan tersebut. Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain "apa yang harus dipertanggungjawabkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lainnya (Lindsay Amiel, 2014).

Akuntabilitas yang merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Rentetan kegiatan-kegiatan sejak dari pemahaman tugas dan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil akhir akan mempunyai dampak terhadap kegiatan orang lain. Khususnya pihak-pihak yang memerlukan pelayanan. Untuk itu perlu dicermati kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan seseorang/pejabat tersebut masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada di luar jalur tanggung jawab dan kewenangannya sehingga tingkah laku pejabat perlu memperhatikan lingkungannya. Akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat sehingga perlu disadari bahwa semua kegiatan organisasi publik dalam memberikan pelayanan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari public (Choirul Saleh, 2014).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan Perpres nomor 29 tahun 2014. Menurut Perpres nomor 29 tahun 2014 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Menurut Charles, (2014) Akuntabilitas adalah hubungan mendasar antara menunjukkan kewajiban dan keberadaan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang sebelumnya ada kesempatan dan harapan. Setiap dari dalam akuntabilitas untuk keseluruhan kegiatan – termasuk di dalamnya keputusan tidak menerima kegiatan dalam lingkungan kerja.

Menurut Indra (2016) akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Akuntabilitas kinerja adalah capaian kinerja tujuan dan sasaran kinerja dengan pengungkapan dan hasil pengukuran kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun saat ini dan tahun sebelumnya. Kesirnpulan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

### 2.1.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi

Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
e. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
f. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014).

### 2.1.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan

dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasi:fikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri clari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, antara lain:

1. Rencana Strategik

   Rencana Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi ada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungk.an potensi, peluang, clan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, clan program serta ukuran keberhasilan clan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2. Perencanaan Kinerja

   Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan clan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan.

3. Pengukuran Kinerja

   Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran clan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategik.

4. Pelaporan Kinerja

   Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## 2.2 Pengertian Anggaran

Semakin kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, menuntut banyak kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Pelaksanaan kegiatan hendaknya dilakukan melalui perencanaan yang cermat.Anggaran adalah salah satu dari berbagai rencana yang disusun serta berperan penting, anggaran dapat membantu perencanaan,

pengkoordinasian, dan, pengawasan guna mencapai tujuan. Menurut Abdul Halim (2012) anggaran dapat diartikan sebagai rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Menurut Rusdianto (2016) Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam sautuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan.

Narifin (2012) mengatakan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Halim dan Kusufi (2014) Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Sasongko dan Parulian (2015 ) anggaran merupakan suatu rencana yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, anggaran adalah suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dilakukan secara sistematis dan

formal untuk mencapai tujuan dan dilakukan melalui koordinasi dan kontrol tanggung jawab manajemen.

### 2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, nusi, dan rencana strategik orgarusasi (Endrayani, at all, 2014).

Anggraini dan Puranto (2014) definisi anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan anggaran berbasis kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian/lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Lebih lanjut Mahmudi (2016) mendefiniskan bahwa anggaran berbasis kinerja yaitu sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektifitas anggaran. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan

program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja yang berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi yang mengaitkan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dan dapat mencerminkan efisiensi untuk setiap pelayanan publik yang diselenggarakan. Setiap dana yang dianggarkan untuk setiap pelayanan publik yang dilakukan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang II-2 direpresentasikan ke dalam tolak ukur kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang telah direncanakan.

### 2.1.2 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Djayasinga (2015) manfaat anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi umpan balik bagi seluruh organisasi untuk mengambil langkah untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Organisasi akan mempunyai rencana kerja yang pasti dan menjadi acuan bagi pegawainya untuk mencapai tujuan itu.
3. Pegawai akan lebih termotivasi bekerja sebab tolak ukur penilaiannya jelas.
4. Bahan untuk promosi atau penundaan jabatan, penghargaan, hukuman atau lainnya jelas dasarnya.

5. Pegawai akan lebih efektif bekerja karena tahu dan jelas apa yang akan dikerjakannya untuk satu periode ke depan.
6. Dapat menggerakkan organisasi ke arah yang lebih baik.
7. Dapat membantu masyarakat sebagai salah satu stakeholder pembangunan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan yang sudah diberikan.
8. Merupakan sebuah alat komunikasi yang efektif antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.

### 2.2.3 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Pribadi (2016) siklus anggaran meliputi empat tahap, antara lain:

1. Tahap Persiapan Anggaran *(Budget Preparation)*

   Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap Ratifikasi *(Approval/Ratification)*

   Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *"managerial skiff", "salesmanship",* dan *"coalition building"* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap

ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan clan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap lmplementasi *(Implementation)*

   Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode anggaran berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi *(Reporting and Evaluation)*

   Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan clan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah.

### 2.2.4 Kelebihan Anggaran Berbasis Kinerja

Deddi (2016) dijelaskan bahwa kelebihan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.
2. Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur *output* dan *input.*
3. Anggaran kinerja mensyaratkan adanya data-data kinerja memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu.
4. Menyediakan pada eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.
5. Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memai anggaran daripada beberapa jumlah anggaran yang terpakai.

Prinsip – Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Pribadi (2016) Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja antaralain:

1. Prinsip Value for money, Dalam kaitan dengan penganggaran prinsip ini digunakan untuk menilai apakah RS telah mendapatkan manfaat maksimal dari belanja yang dilakukan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Pencapaian *value for* ***money*** sering digambarkan dalam bentuk tiga E, yaitu:
    a. Ekonomis, yaitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu kegiatan (mengerjakan sesuatu dengan biaya rendah);
    b. Efisien, yaitu melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal (melakukan sesuatu dengan benar);
    c. Efektif, yaitu sejauh mana sasaran dicapai (melakukan hal yang benar).
2. Prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip ini telah diadopsi oleh hampir semua perusahaan atau pemerintahan yang mengaku menjalakan manajemen

atau administrasi publik yang modern. bentuk-bentuk prinsip *Good Corporate Governance* ini adalah:

a. *Participation*, adanya partisipasi dari semua pihak yang ada didalam RS.
b. *Rule of law*, dalam kaitan dengan sistem penganggaran prinsip ini merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. Anggaran ditetapkan dengan Undang-Undang begitu juga aturan-aturan pelaksanaan semua harus mengacu pada Undang-undang.
c. *Transparency*, prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggungjawab pengelolaan keuangan RS, termasuk dalam proses perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit keuangan dan jika perlu pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pengelolaan keuangan.
d. *Responsiveness*, sistem penganggaran harus mampu menampung semua kebutuhan perusahaan (termasuk pihak-pihak yang berkepentingan) dalam waktu yang masuk akal.
e. *Consensus orientation*, penganggaran harus mengakomodir segala kepentingan yang ada didalam perusahaan (atau jika perlu pihah-pihak berkepentingan/masyarakat luas) atau juga dikenal dengan istilah anggaran partisipatif.
f. *Equity and inclusiveness*, kesamaan dan pengikutsertaan jika diterapkan dalam sistem penganggaran maka semua keputusan dalam bidang keuangan dibuat demi kepentingan seluruh pihak yang ada didalam RS bukan hanya sebagian golongan.

g. *Effectiveness and efficiency*, anggaran berbasis kinerja merupakan cerminan kedua prinsip tersebut. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar dan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar. Keputusan anggaran harus memilih hal-hal yang benar untuk dibiayai oleh RS dan mengelola pengeluaran dana-dana dan sumber daya tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan benar.

h. *Accountability*, akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertangggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana RS akan digunakan. Audit program dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang akan diuraikan secara ringkas karena penelitian yang akan dilakukan mengacu pada penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan baik dari segi objek maupun dari segi waktu penelitian. Seperti pada penelitian terdahulu ini:

**Tabel 2.1**
**Penelitian Teradahulu**

| No | Peneliti | Judul | Metode Analisis | Hasil Penelitian | Persamaan | Perpedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Endrayani , at all (2014) | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja) | Metode penelitian kuantitatif | Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. | Sama-sama mengkaji tentang Penerapan anggaran berbasis kinerja dan Akuntabilitas Kinerja | Tempat dan segi waktu penelitian |
| **2** | Utami, at all (2016) | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Metode penelitian kuantitatif | Perencanaan anggaran, implementasi anggaran,pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. | Sama-sama mengkaji tentang Penerapan anggaran berbasis kinerja dan Akuntabilitas Kinerja | Tempat dan segi waktu penelitian |
| 3 | Syaripuddin, sutriana Basri (2017) | Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kendari) | Metode penelitian kuantitatif | Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD kota Kendari dan evalusai kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi | Sama-sama mengkaji tentang Penerapan anggaran berbasis kinerja dan Akuntabilitas Kinerja | Tempat dan segi waktu penelitian |

**Lanjutan Tabel 2.1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sya' Roni (2018) | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Metode penelitian kuantitatif | Hasil Analisis Regresi menunjukkan variabel perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. | Sama-sama mengkaji tentang Penerapan anggaran berbasis kinerja dan Akuntabilitas Kinerja | Tempat dan segi waktu penelitian |
| 5 | Helina (2019) | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar | Metode penelitian kuantitatif | Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Makassar | Sama-sama mengkaji tentang Penerapan anggaran berbasis kinerja dan Akuntabilitas Kinerja | Tempat dan segi waktu penelitian |

*Sumber : Data diolah 2022*

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen (Sugiyono, 2017:63). Terdapat satu variabel independen pada penelitian ini Anggaran Berbasis Kinerja yang dapat mempengaruhi variabel dependen adalah Akuntanbilitas Kinerja. Kerangka pemikiran menjelaskan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntanbilitas Kinerja. Maka kerangka pemikiran dibawah ini yang menjelaskan bagaimana hubungan variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntanbilitas Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori, bahwa anggaran digunakan sebagai pertanggungjawaban. Dari teori agency tersebut dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran juga akan mempengaruhi keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja. Dalam tata kelola organisasi sektor publik dikenal prinsip *Good Governance*. Dalam prinsip tersebut dikenal beberapa aspek salah satunya yaitu akuntabilitas dan transparansi. Dalam akuntabilitas publik maka perlu pertanggungjawaban dan kordinasi yang baik agar informasi yang diberikan akurat (Mardiasmo, 2018).

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitaspelayanan public, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Pelaksanaan kegiatan pemerintah berpegang pada anggaranyang ditetapkan, sehingga tercapainya anggaranberarti juga tercapainya sasaranpemerintah daerah. Oleh karena itu anggaran seharusnya mempunyai kualitas yang baik dan realistis, dengan adanya pengendalian keuanganyang efektif, pelaksanaan anggaran dapat lebih baiksehingga dapat meningkatkan akuntabilitas public (Safaruddin, Sutriana, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa ketika penerapan anggaran berbasis kinerja naik, maka terhadap akuntabilitas publik juga naik, sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syaripuddin, sutriana Basri (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD kota Kendari.

Dari hasil penjelasan diatas maka konsep kerangka pemikiran dapat disajikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas dan penelitian terdahulu maka dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis Peneliti :

H : Di duga Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh Utara.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Desain Penelitian

Menurut Chandrarin (2017:109) Desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi. Suliyanto (2018) menjelaskan desain penelitian sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan efisien. Menurut Suliyanto desain tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian penelitian tidak hanya berguna bagi pimpinan proyek penelitian atau ketua peneliti saja. Pada nantinya, pihak-pihak tersebut akan mengetahui: 1) mengapa perlu dilakukan penelitian; 2) apa yang harus dikerjakan; 3) siapa saja yang terlibat dalam penelitian; 4) kapan penelitian harus dimulai dan diselesaikan; 5) berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian.

Menurut Sekaran (2016:118), desain atau rancangan suatu penelitian harus memuat: 1) tujuan studi; 2) tipe penelitian; 3) luas intervensi penelitian; 4) lingkungan studi; 5) unit analisis; 6) horizon waktu. Berikut penjelasann masing-masing desain penelitian:

1) Tujuan studi

   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi Instansi Pemerintah Aceh Utara.



25

2) Tipe penelitian

Penelitian mengenai "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh Utara", merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Penggunaaan metode kuantitatif pada penelitian ini dimaksud untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, menguji teori dan melakukan generalisasi objek penelitian.

3) Luas intervensi

Peneliti tidak memiliki kemampuan dalam mengintervensi, baik berupa pengendalian maupun memanipulasi variabel, karena variabel tersebut sudah ada *ex post facto*.

4) Lingkungan studi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dengan kondisi lingkungan penelitian yang sebenarnya (natural) yaitu di Instansi Pemerintah Aceh Utara.

5) Unit analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah SKPD kategori Dinas Kabupaten Aceh Utara.

6) Horizon waktu

Dalam penelitian ini tidak ada horizon waktu karena penelitian ini menggunakan data primer.

## 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Sugiyono (2017), menyatakan bahwa populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiarto (2017), populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam lingkup yang ingin diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah katagori Dinas di lingkungan kerja Kabupaten Aceh Utara. Adapun Sampel dalam penelitian ini yaitu 19 SKPK dari 60 SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel dan mencari subjek berdasarkan hal-hal yang menyenangkan atau diminati oleh peneliti. Sampel dipilih berdasarkan populasi yang tersedia dan mudah dijangkau oleh peneliti. Subjek penelitian dijadikan sebagai sampel karena secara kebetulan ditemukan di lokasi dan keadaan yang bersamaan dengan pengambilan data. Sampel pada teknik ini diambil tanpa sistematika apapun. Biasanya, peneliti memilih teknik ini karena ketidakmungkinan untuk menjangkau semua populasi yang sangat besar dan tempat penelitian yang sangat luas adapun jumlah responden akhir sebanyak 38 sampel.

**Tabel 3.1**
**Sampel SKPK Kabupaten Aceh Utara**

| No | Nama SKPK | Jumlah orang | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Syariat Islam | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 2 | Dinas Pendidikan Dayah | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 4 | Dinas Kesehatan | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 6 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 8 | Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 9 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 10 | Dinas Pertanian dan Pangan | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 12 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 14 | Dinas Perhubungan | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 15 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 16 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 17 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |
| 19 | Dinas Pertanahan. | 2 | Kabid Keuangan dan Staf |

### 3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:137) pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teknik pengumpulan data yang menggunakan kuesioner (angket). Keuntungan penelitian menggunakan kuesioner menurut Arikunto (2010:148) yaitu: a) tidak memerlukan kehadiran peneliti; b) dapat dibagikan serentak; c) dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu uang ada; d) dapat dibuat *anonym;* e) kuesioner dapat dibuat standar. Menurut Sugiyono (2017:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Hasil kuesioner berupa jawaban responden yang diukur dengan skala *likert,* yang mana sikap responden dari :

1. Sangat tidak setuju diwakili oleh poin (1)
2. Tidak setuju diwakili oleh poin (2)
3. Netral diwakili oleh poin (3)
4. setuju diwakili oleh poin (4)
5. Sangat setuju diwakili oleh poin (5)

Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang disebar kapada responden atau, yang telah terstruktur bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai pada satuan kerja perangkat daerah kategori Dinas Kabupaten Aceh Utara.

## 3.4 Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel

**Tabel 3.1**
**Operasional Variabel**

| No | Variabel | Definisi | Indikator | Item Pertanyaan | Skala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntanbilitas Kinerja (Herlina, 2019) | Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggungjawaban secara periodik | 1. Pertanggung Jawaban | 1-10 | Skala likert (1 – 5) |
| 2 | Anggaran Berbasis Kinerja (Herlina, 2019) | Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan menghubungkan pengeluaran dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi input,output dan outcome yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan | 1. Perencanaan Anggaran<br>2. Pelaksanaan Anggaran<br>3. Pelaporan Pertanggung Jawaban Anggaran<br>4. Evaluasi Kinerja | 1-10 | Skala likert (1 – 5) |

*Sumber : Data diolah 2022*

## 3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam Marlina (2016), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang akan diisi oleh responden kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data atau SPSS versi 22 untuk menghasilkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y : Akuntabilitas Kinerja
a : Konstanta/ Intercept
b : Koefisien Regresi Parsial
$X$ : Anggaran Berbasis Kinerja

Metode analisis data yang digunakan dan langkah-langkah dalam mengelola data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 3.5.1 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:267), uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Sanusi (2011), suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen pada umumnya digunakan standar perbandingan

antara nilai r-tabel dengan r-hitung pada taraf kepercayaan 95 % atau tingkat signifikan 5 %.

b. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2017:130) mendefinisikan bahwa uji reabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objekyang sama akan menghasilkan data yang sama. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiono, 2017:268). Uji reliabilitas data menggunakan formula *Conbrach Alpha* > 0,60 (Sanusi, 2011:80).

**3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Nyoto (2015) uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau mendekati normal bisa dilakukan dengan menggunakan analisis grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi, normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, yaitu dengan melihat serta melalui/menggunakan uji Gletjer, uji Park dan uji White. Uji heterokedastisitas yang paling sering digunakan adalah uji Glejser (Sarjono dan Julianita, 2018:66).

**3.5.3 Uji Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linear sederhana. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t), Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) dan Uji Koefisien Determinasi (R2).

1. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen (Y) apabila nilai variabel

independen (X) mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah positif atau negatif.

Adapun rumus persamaan regresi linier sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y : Akuntabilitas Kinerja
a : Konstanta/ Intercept
b : Koefisien Regresi Parsial
*X* : Anggaran Berbasis Kinerja

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Sanusi (2011:138) menyatakan bahwa uji statistik t digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai $t_{hitung}$ sebagai berikut (Sarjono dan Julianita, 2018:149) :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka $H_0$ ditolak, $H_a$ diterima (berarti ada pengaruh).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka $H_0$ diterima, $H_a$ ditolak (berarti tidak ada pengaruh).

3. Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)

Koefisien determinasi $R^2$ adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat (Y) dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif (Sanusi, 2011:136). Persamaan regresi linear sederhana semakin baik apabila nilai koefisien determinasi ($R^2$) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2011:136).

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan dengan luas wilayah 3.297 km2. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur.

Secara umum Kabupaten Aceh Utara memiliki 60 SKPK namun dalam melakukan analisis peniliti hanya membatasi pada 19 SKPK yang terdiri dari Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanahan.

## 4.2 Karakteristik Responden pada Instansi Pemerintah Aceh Utara

Berikut ini akan dikemukakan gambaran umum responden yang menjadi objek penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah katagori Dinas di lingkungan kerja Kabupaten Aceh Utara.



35

Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**1. Responden Berdasarkan Jenis kelamin**

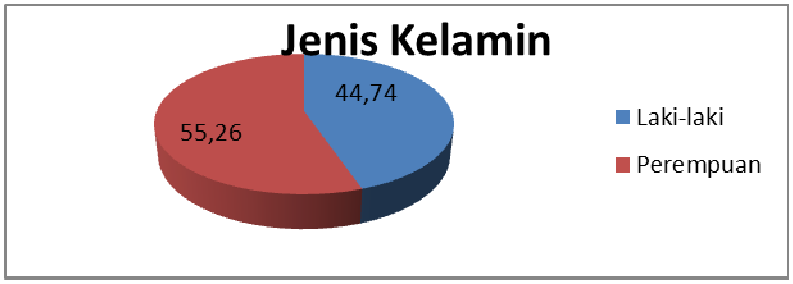


*Sumber : Data Penelitian 2022*

Berdasarkan Garfik diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah katagori Dinas di lingkungan kerja Kabupaten Aceh Utara laki-laki sebanyak 17 orang atau 44,74% responden sedangkan jumlah perempuan sebanyak 21 orang atau 55,26 %.

**2. Responden Berdasarkan Umur**

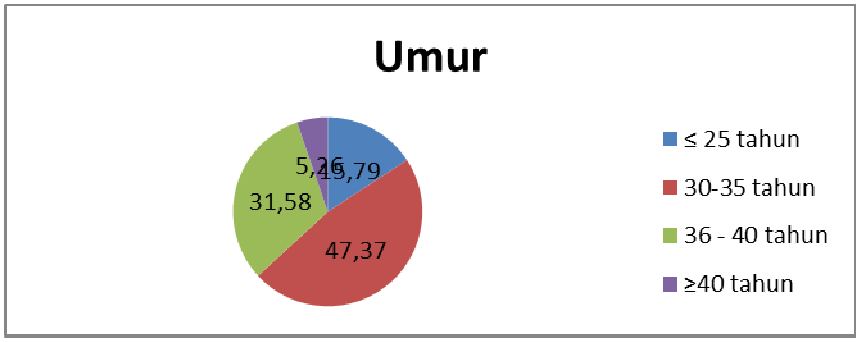


*Sumber : Data Penelitian 2022*

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa umur Pegawai yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah katagori Dinas di lingkungan kerja Kabupaten Aceh Utara adalah usia 30-35 tahun sebanyak 18 orang atau 47,37% responden diikuti dengan usia yang berumur 36-40 tahun sebanyak 12 orang atau 31,58 % dan diatas 40 tahun sebanyak 2 orang atau 5,26%, sisanya ≤ 25 tahun

sebanyak 6 orang atau 15,79%.

**3. Responden Berdasarkan Status Perkawinan**

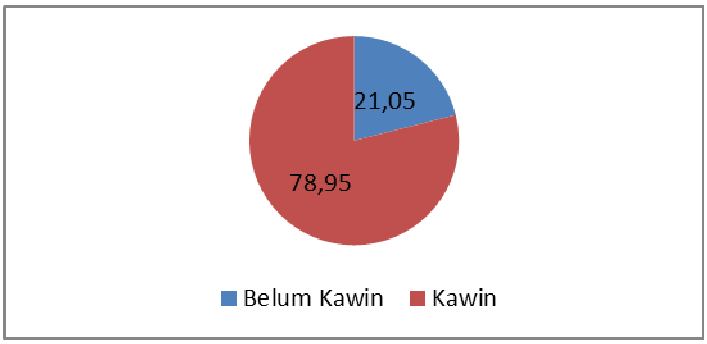


*Sumber : Data Penelitian 2022*

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa responden yang bekerja pada Pegawai yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah katagori Dinas di lingkungan kerja Kabupaten Aceh Utara terbanyak adalah orang yang sudah menikah sebanyak 30 orang atau 78,95 %. Sedangkan orang yang belum menikah sebanyak 8 orang atau 21,05 %.

**4 Responden Berdasarkan Pendidikan**

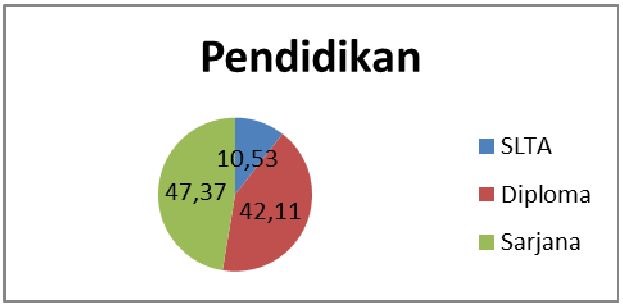


*Sumber : Data Penelitian 2022*

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa yang paling banyak bekerja pada Pegawai yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah katagori Dinas di lingkungan kerja Kabupaten Aceh Utara adalah Diploma sebanyak 16 orang

atau 42,11% responden diikuti dengan pendidikan SLTA sebanyak 4 orang atau 10,53%, Sarjana sebanyak 18 orang atau 47,37.

## 4.3 Hasil Penelitian

### 4.3.1 Analisis Data

Untuk menguji kualitas data dalam hal ini, data memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti akan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, oleh karena itu benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Dilain pihak, benar tidaknya data, bergantung pada baik tidaknya instrumen data, kuesioner sebagai instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan valid dan reliable.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran valid jika mengukur tujuan nyata atau benar. Uji validitas ini adalah suatu alat ukur yang mengukur sejauh mana kuesioner atau alat ukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai kerangka konsep. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r dihitung lebih besar dibandingkan koefisien r tabel pada taraf signifikasi 0,05 atau 5%. Dengan jumlah responden sebanyak 38 responden dengan alpha 0,05 atau 5% maka didapatkan r tabel = 0,320. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel. Berikut ini merupakan hasil uji validitas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Anggaran Berbasis Kinerja (X)

| Variabel | Item | r Tabel | r Hitung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan anggaran (X1) | 1 | 0,329 | 0,672 | Valid |
| | 2 | 0,329 | 0,751 | Valid |
| | 3 | 0,329 | 0,760 | Valid |
| | 4 | 0,329 | 0,759 | Valid |
| | 5 | 0,329 | 0,802 | Valid |
| | 6 | 0,329 | 0,791 | Valid |
| | 7 | 0,329 | 0,776 | Valid |
| | 8 | 0,329 | 0,837 | Valid |
| | 9 | 0,329 | 0,662 | Valid |
| | 10 | 0,329 | 0,693 | Valid |

*Sumber: Data Primer diolah (2022)*

Berdasarkan hasil uji validitas data X1 pada tabel 4.1, untuk masing-masing butir pernyataan berjumlah 10 bernilai positif menunjukkan r hitung > r tabel pada taraf 5%. Dengan demikian data tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja (Y)

| Variabe | Item | r Tabel | r Hitung | Keteranga |
|---|---|---|---|---|
| Akuntabilitas Kinerja (Y) | 1 | 0,329 | 0,604 | Valid |
| | 2 | 0,329 | 0,613 | Valid |
| | 3 | 0,329 | 0,658 | Valid |
| | 4 | 0,329 | 0,691 | Valid |
| | 5 | 0,329 | 0,553 | Valid |
| | 6 | 0,329 | 0,657 | Valid |
| | 7 | 0,329 | 0,770 | Valid |
| | 8 | 0,329 | 0,719 | Valid |
| | 9 | 0,329 | 0,561 | Valid |
| | 10 | 0,329 | 0,566 | Valid |

*Sumber: Data Primer diolah (2022)*

Berdasarkan hasil uji validitas data Y pada tabel 4.2, untuk masing-masing butir pernyataan berjumlah 10 bernilai positif menunjukkan r hitung > r tabel pada taraf 5%. Dengan demikian data tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas satu skor dari suatu instrumen pengukuran. Uji reliabilitas hanya dilakukan pada pertanyaan yang dianggap sah. Koefisien *cronbach's* yang lebih dari nilai r tabel disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika *alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan keandalan instrumen. Selain itu, *cronbach's alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal realibilitasnya

Tabel 4.3
Hasil Uji Reabilitas Variabel

| Variabel | Cronbach's Alpha | Batas Reliabilitas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Anggaran Berbasis Kinerja (X) | ,928 | 0,60 | Reliabel |
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) | ,884 | 0,60 | Reliabel |

Sumber: SPSS 2022

Berdasarkan tabel tersebut, hasil *Cronbach's Alpha* untuk variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 0,928 dan untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,884 keduanya lebih besar dari 0,60 dan dapat dikatakan bahwa instrumen (kuisioner penelitian) reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah model regresi linier sederhana, karena menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Model regresi linier sederhana yang baik adalah jika memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik. Sehingga perlu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dan uji heteroskesedasitas. Berikut akan digambarkan masing-masing dari hasil uji asumsi klasik dengan bantuan *SPSS 20.0*:

Berdasarkan hasil pengujian segala penyimpangan klasik terhadap data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat memiliki distribusi normal atau tidak model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati data normal.

Uji *Kolmogorov Sminov* digunakan untuk uji statistik apakah data terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Uji *Kolmogorov Sminov* dengan ketentuan yaitu jika nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang telah ditetapkan maka terdistribusi secara normal. Uji *Kolmogorov* dapat dilihat tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**
**Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov*)**
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 38 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | -,0000051 |
| | Std. Deviation | 2159768,71189642 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,121 |
| | Positive | ,100 |
| | Negative | -,121 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,812 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,524 |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat menjelaskan bahwa nilai *Kolmogorov-smirnov* variabel angaran berbasis kinerja telah terdistribusi secara normal karena dari variabel memiliki probabilitas lebih dari 0,05 (5%). Nilai variabel yang memenuhi standar yang ditetapkan dapat pada baris Asymp.sig. (2-tailed). Dari tabel diatas

terdapat nilai asymp.sig. (2-tailed)= 0,524 (52,4%). Dari nilai tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai Asymp.sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yang berarti varibel telah terdistribusi secara normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menjelaskan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda. Sedangkan terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Model regresi yang baik merupakan tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji glejser. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser, yaitu menganalisis nilai absolut residual terhadap variabel independen. Tidak terjadi heteroskedasitas apabila nilai signifikansinya > 0,05. Sebaliknya, terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya < 0,05.

Tabel 4.5
Uji Glejser

**Coefficients**[a]

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 12,282 | 46,722 | | 1,172 | ,248 |
| | Anggaran Berbasis Kinerja | 85,432 | 21,681 | ,177 | 1,179 | ,245 |

a. Dependent Variable: Abs_Res
Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 menjelaskan bahwa nilai signifikan Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 0,245 yang berarti 0,245 > 0,05 bahwa nilai variabel

independen lebih besar dari 0,05 yang disimpulkan bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

**2. Analisis Regresi Linier Sederhana**

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 26,221 | 8,846 | | 4,606 | 0,000 |
| | Anggara berbasis kinerja X | 7,301 | 4,405 | 0,704 | 6,428 | 0,000 |

*Sumber: output SPSS , Data diolah 2022*

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui hasil uji regresi linier sederhana dengan persamaan regresi linier berganda yaitu:

$Y$ = a+ b$X$ + $e$

Y = 26,221+ 7,301 b$X$ + e

1. Nilai konstanta a sebesar 26,221 menunjukkan bahwa apabila variabel Anggaran Berbasis Kinerja dalam keadaan konstanta (tetap) maka Akuntabilitas Kinerja sebesar 26,221 satuan.
2. Koefisien regresi X (anggaran berbasis kinerja) sebesar 7,301 menyatakan bahwa setiap kenaikan anggaran berbasis kinerja 1 persen maka akan menaikkan Akuntabilitas Kinerja sebesar 7,301 satuan dan sebaliknya jika setiap penurunan Anggaran Berbasis Kinerja akan menurunkan Akuntabilitas Kinerja sebesar 7,301 satuan.

### 3. Hasil Uji Hipotesis

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial atau secara individu antara X (Anggaran Berbasis Kinerja) terhadap Y (Angkuntabilitas Kinerja). Hasil uji t menunjukkan:

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik t

| No | Uraian | $t_{hitung}$ | $t_{tabel}$ | Sig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran Berbasis Kinerja (X) | 6,428 | 2,028 | 0,000 |

*Sumber: output SPSS , Data diolah 2022*

Berdasarkan hasil dari analisis diatas dan dengan melihat tabel 4.7, tabel *uji statistik* diperoleh nilai $t_{hitung}$ sebesar 6,428 dibandingkan dengan $t_{tabel}$ yang memiliki taraf signifikansi (α=5%) 0,05 dan diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi (α=5%) 0,05. Hasil keduanya diperoleh $t_{hitung}$ lebih besar dari $t_{tabel}$ yaitu 6,428 > 2,028, sedangkan nilai Sig. lebih kecil dari α yaitu 0,000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis H0 ditolak dan Hipotesi H1 terima, sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja .

### 4. Analisis Koefisisen Determinasi ($R^2$)

Tabel 4.8
Koefisisen Determinasi ($R^2$)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,984a | ,969 | ,968 | 2184737,96583 |

*Sumber: output SPSS , Data diolah 2022*

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai koefisisen korelasi (R) sebesar 0,984 x 100% = 98,4% hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja (Y) berkorelasi positif atau mempunyai hubungan yang kuat karena mendekati angka 1, kemudian untuk Nilai koefisien determinasi ($R^2$) sebesar 0,969 x 100% = 96,9% menunjukkan bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 96,9% dan sisanya sebesar 3,1% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**4.5 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai hubungan cenderung positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan hasil $t_{hitung}$ lebih besar dari $t_{tabel}$ yaitu 6,428 > 2,028 sedangkan nilai Sig. lebih kecil dari $\alpha$ yaitu 0,000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis H0 ditolak dan Hipotesis H1 terima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan pada setiap SKPK, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja para pimpinan dan pegawainya. Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki nilai yang cukup berarti bagi akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Utara terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada suatu instansi terkait dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan setiap instansi pemerintah kabupaten Aceh Utara harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat

yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan, sehingga setiap komponen dalam instansi pemerintah bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja *(output/outcome)* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang ditetapkan. Dalam memahami penganggaran berbasis kinerja, komitmen dari seluruh komponen organisasi untuk menyiapkan sumber daya berupa anggaran, kegiatan, dan sumber daya manusia sangat penting. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Utami, at all (2016) yang bahwa perencanaan anggaran,implementasi anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Endrayani, at all (2014) memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sya' Roni (2018) dan Helina (2019) dengan hasil analisis regresi menunjukkan variabel perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan akuntabilitas publik merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2009) yaitu akuntabilitas merupakan suatu prinsip

pertanggungjawaban yang artinya bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian dari Syaripuddin, dan Basri (2017) dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( BPKAD) kota Kendari.

# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil Uji Statistik menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Berdasakan hasil uji regresi linear di proroleh koefisien X sebesar 7,301 kemudian nilai $t_{hitung}$ lebih besar dari $t_{tabel}$ yaitu 6,428 > 2,028 sedangkan nilai Sig. lebih kecil dari α yaitu 0,000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis H0 ditolak dan Hipotesi H1 terima.
2. Hasil uji koefisien determinasi ($R^2$) menunjukkan bahwa pengaruh atau kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 96,9% dan sisanya sebesar 3,1% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini .

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi kepala SKPK Kabupaten Aceh Utara hendaknya meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka penyediaan layanan publik dengan memperhatikan ketersediaan sumber dana melalui penyusunan anggaran berbasis kinerja.



48

2. Pemerintah Daerah harus meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam pengelolaaan keuangan daerah.
3. Kemudian Dalam penyusunan APBD berbasis kinerja pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran yaitu, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran. Anggaran disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan pencapaian hasil *output/outcome.*
4. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menganalisis lebih detail lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas berbasis kinerja dengan mengambil sampel kabupaten yang berbeda diluar Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dimaksudkan agar dapat membandingkan sejauh mana Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di SKPD lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Halim. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.

Anggraini dan Puranto, 2014. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Arikunto 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bahri, Syambudi Prasetia. 2012. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)". Bandung: Universitas Pasundan.

Basri, 2017. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Chandrarin, 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manjemen.*Yogyakarta.

Charles, 2014. *Handbook ilmu komunikasi.* Bandung: Nusa media.

Choirul Saleh, 2014. "E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik,13(1)*.

Deddi Nordiawan. 2016. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Endrayani, at all. 2014. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)". *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).*

Halim dan Kusufi. 2014. *Pengelolaan Keuangan Daerah (SeriBunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah). Edisi Ketiga, CetakanPertama*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Hasniati 2016 . *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Helina 2019. "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar". *Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 12. e- ISSN: 2116-412.*

Indra Bastian. 2016. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.

Iqbal Hasan. 2012. *Pokok-pokok Materi Statistik 2, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2003). Jakarta: Lembaga Adminstrasi Negara.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Komang, dkk, 2014. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja". *(Jurnal Akuntansiy; (online), Vol 2, No 1.*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 (2021). Aceh Utara: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Lindsay Amiel, 2014. " Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Padang Lambe Kota Palopo". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma Palopo.*

Mahmudi, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo, 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Narifin, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Nyoto, 2015. "Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata Kota Manado". *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 14(1). e- ISSN: 2686-4215.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2007) Jakarta: Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014) Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja.

Pribadi. 2016. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta.

Program Strata Satu. 2016. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Rusdianto. 2016. "Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat sebagai Variabel Moderating Di Pati". *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1.*

Santoso Singgih. 2012. *Mengolah Data Statisttk Secara Profesional*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo.

Santoso. 2015. Keagenan (Agency): *Prinsip-prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sanusi, 2011. *Metode Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Sarjono dan Julianita, 2018. *SPSS VS LISREL*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, 2016. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Sugiono, 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manjemen.* Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

Sulisiana. 2013. "Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Dividend Payout Ratio, Cash Holding Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan". Skripsi.

Suliyanto, 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sya' Roni. 2018. " Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Akuntansi, Vol. 5. e- ISSN: 2116-6541*

Syambudi Prasetia Bahri. 2012. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)". Skripsi Tidak Diterbitkan. Bandung: Program Studi Akuntansi, Universitas Pasundan Bandung.

Syaripuddin, sutriana Basri 2017. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari)". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1).*

Utami, at all (2016). "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2. e- ISSN: 8215.*

Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Pustaka Barn Press.* Yogyakarta.

**Lampiran I**

## KUISIONER

### A. Demografi Responden

No. Responden : …….
Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai dengan pilihan anda

### I. KARAKTERISTIK RESPONDEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenis Kelamin | : ☐ laki – laki | ☐ Perempuan |
| 2. | Status Perkawinan | : ☐ Belum kawin<br>☐ Janda | ☐ Kawin<br>☐ Duda |
| 3. | Pendidikan | : ☐ SLTP<br>☐ Diploma<br>☐ Pasca Sarjana | ☐ SLTA<br>☐ Sarjana |
| 4. | Lama Bekerja | : ☐ 1 – 5 tahun<br>☐ 6 – 10 tahun | ☐11- 15 tahun<br>☐ 16– 20 tahun |

**B. Pernyataan mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja**

Terimakasih Bapak/Ibu, telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (X).

Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/pernyataan.

Dalam pernyataan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja dibagi menjadi 4 (empat) variabel. Variabel pertama adalah perencanaan anggaran, variabel kedua pelaksanaan anggaran, variabel ketiga adalah pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, dan variabel keempat adalah evaluasi kinerja. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

| Keterangan | (STS) Sangat Tidak Setuju | (TS) Tidak Setuju | (R) Ragu | (S) Setuju | (SS) Sangat Setuju |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## C. ANGGARAN BERBASIS KENERJA (X)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | STS | TS | R | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai. | | | | | |
| 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya. | | | | | |
| 3. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)dalam periode tersebut. | | | | | |
| 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam menyusun Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). | | | | | |
| 5. Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) antara kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyar (DPRD). | | | | | |
| 6. Adanya sikronisasi program dan kegiatan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. | | | | | |
| 7. Dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), memperhatikan prinsip– prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. | | | | | |
| 8. Dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta pembahasannya mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Satuan | | | | | |
| 9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melakukan kompilasi Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) menjadi Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. | | | | | |
| 10. Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evalausi APBD dari kabupaten/kota. | | | | | |

Sumber : Herlina 2019

## D. PERNYATAAN MENGENAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | STS | TS | R | S | SS |
| | (1) | (2 | (3) | (4) | (5) |
| 1. Adanya keterkaitan yang erat antara program dan kebijakan dengan pencapaian kinerja. | | | | | |
| 2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pimpinan | | | | | |
| 3. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi. | | | | | |
| 4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program. | | | | | |
| 5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program yang telah selesai dilaksanakan. | | | | | |
| 6. Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan | | | | | |
| 7. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program. | | | | | |
| 8. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program. | | | | | |
| 9. Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat. | | | | | |
| 10. LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan | | | | | |

Sumber : Herlina 2019

Lampiran Hasil Rekapan Jawaban Responden

**Tabulasi Data**

1. Variabel Anggaran Berbasis Kinerja

| NO | Anggaran Berbasis Kinerja (X) | | | | | | | | | | Total | Rerata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39,0 | 3,9 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 47,0 | 4,7 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43,0 | 4,3 |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 38,0 | 3,4 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49,0 | 4,9 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27,0 | 2,7 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46,0 | 4,6 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47,0 | 4,7 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 44,0 | 4,4 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 42,0 | 4,2 |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 41,0 | 4,1 |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44,0 | 4,4 |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45,0 | 4,5 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43,0 | 4,3 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45,0 | 4,5 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38,0 | 3,8 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44,0 | 4,4 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 28 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29,0 | 2,9 |
| 29 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28,0 | 2,8 |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49,0 | 4,9 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |

2. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

| No | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) | | | | | | | | | | Total | Rerata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | 55,0 | 5,5 |
| 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44,0 | 4,4 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48,0 | 4,8 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43,0 | 4,3 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 38,0 | 3,8 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40,0 | 4,0 |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49,0 | 4,9 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 45,0 | 4,5 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41,0 | 4,1 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 47,0 | 4,7 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38,0 | 3,4 |
| 21 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43,0 | 4,3 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 24 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47,0 | 4,7 |
| 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46,0 | 4,6 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46,0 | 4,6 |
| 28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48,0 | 4,8 |
| 29 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37,0 | 3,7 |
| 30 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 35,0 | 3,5 |
| 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35,0 | 3,5 |
| 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31,0 | 3,1 |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39,0 | 3,9 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47,0 | 4,7 |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 5,0 |
| 37 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40,0 | 4,0 |
| 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47,0 | 4,7 |

## Reliability Variabel (X)

**Case Processing Summary**

| | | N | % |
|---|---|---|---|
| Cases | Valid | 38 | 100,0 |
| | Excluded[a] | 0 | ,0 |
| | Total | 38 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| ,928 | 10 |

**Item-Total Statistics**

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---|---|---|---|---|
| VAR00001 | 38,37 | 30,942 | ,672 | ,924 |
| VAR00002 | 38,37 | 31,861 | ,751 | ,920 |
| VAR00003 | 38,21 | 32,873 | ,760 | ,921 |
| VAR00004 | 38,32 | 32,925 | ,759 | ,921 |
| VAR00005 | 38,45 | 30,632 | ,802 | ,917 |
| VAR00006 | 38,55 | 30,416 | ,791 | ,917 |
| VAR00007 | 38,42 | 32,196 | ,776 | ,920 |
| VAR00008 | 38,50 | 30,527 | ,837 | ,915 |
| VAR00009 | 38,79 | 28,873 | ,662 | ,929 |
| VAR00010 | 38,66 | 29,312 | ,693 | ,925 |

## Reliability Variabel (Y)

**Case Processing Summary**

| | | N | % |
|---|---|---|---|
| Cases | Valid | 38 | 100,0 |
| | Excluded[a] | 0 | ,0 |
| | Total | 38 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| ,884 | 10 |

**Item-Total Statistics**

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---|---|---|---|---|
| VAR00001 | 38,89 | 24,151 | ,604 | ,874 |
| VAR00002 | 38,74 | 23,550 | ,613 | ,873 |
| VAR00003 | 39,16 | 20,407 | ,658 | ,874 |
| VAR00004 | 38,79 | 24,117 | ,691 | ,871 |
| VAR00005 | 38,74 | 23,226 | ,553 | ,877 |
| VAR00006 | 38,87 | 22,442 | ,657 | ,870 |
| VAR00007 | 38,84 | 23,110 | ,770 | ,864 |
| VAR00008 | 38,63 | 23,861 | ,719 | ,869 |
| VAR00009 | 39,00 | 22,378 | ,561 | ,879 |
| VAR00010 | 38,76 | 23,159 | ,566 | ,876 |

**Lampiran 3**

## Hasil Regreasi Linear Sederhana

## Regression

**Descriptive Statistics**

| | Mean | Std. Deviation | N |
|---|---|---|---|
| Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | 4,3368 | ,56061 | 38 |
| Anggaran Berbasis Kinerja | 4,2737 | ,61674 | 38 |

**Correlations**

| | | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Anggaran Berbasis Kinerja |
|---|---|---|---|
| Pearson Correlation | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | 1,000 | -,264 |
| | Anggaran Berbasis Kinerja | -,264 | 1,000 |
| Sig. (1-tailed) | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | . | ,054 |
| | Anggaran Berbasis Kinerja | ,054 | . |
| N | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | 38 | 38 |
| | Anggaran Berbasis Kinerja | 38 | 38 |

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | | Durbin-Watson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |
| 1 | ,984a | ,969 | ,968 | 2184737,96583 | ,969 | 2,707 | 1 | 36 | ,000 | 1,465 |

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | ,813 | 1 | ,813 | 2,707 | ,000[b] |
| | Residual | 10,815 | 36 | ,300 | | |
| | Total | 11,628 | 37 | | | |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | 95,0% Confidence Interval for B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Lower Bound | Upper Bound |
| 1 | (Constant) | 26,221 | 8,846 | | 4,606 | ,000 | 4,085 | 6,643 |
| | Anggaran Berbasis Kinerja | 7,301 | 4,405 | 0,704 | 6,428 | ,000 | ,537 | ,056 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

**Residuals Statistics[a]**

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Predicted Value | 4,1622 | 4,7151 | 4,3368 | ,14826 | 38 |
| Residual | -1,06224 | 1,07333 | ,00000 | ,54065 | 38 |
| Std. Predicted Value | -1,178 | 2,552 | ,000 | 1,000 | 38 |
| Std. Residual | -1,938 | 1,958 | ,000 | ,986 | 38 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

## Lampiran 4

# Uji Heterokedastisitas

**Notes**

| | | |
|---|---|---|
| Output Created | | |
| Comments | | |
| Input | Active Dataset | DataSet0 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 38 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics are based on cases with no missing values for any variable used. |
| Syntax | | REGRESSION<br>/MISSING LISTWISE<br>/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA<br>/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)<br>/NOORIGIN<br>/DEPENDENT Abs_Res<br>/METHOD=ENTER X1. |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,02 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,03 |
| | Memory Required | 1396 bytes |
| | Additional Memory Required for Residual Plots | 0 bytes |

[DataSet0]

**Variables Entered/Removed[a]**

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran Berbasis Kinerja [b] | . | Enter |

a. Dependent Variable: Abs_Res

b. All requested variables entered.

**Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,177[a] | ,031 | ,009 | 1155567,56302 |

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 1855700468608,175 | 1 | 1855700468608,175 | 1,390 | ,245[b] |
| | Residual | 57419464885876,890 | 36 | 1335336392694,812 | | |
| | Total | 59275165354485,060 | 37 | | | |

a. Dependent Variable: Abs_Res

b. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 12,282 | 46,722 | | 1,172 | ,248 |
| | Anggaran Berbasis Kinerja | 85,432 | 21,681 | ,177 | 1,179 | ,245 |

a. Dependent Variable: Abs_Res

## Uji Normalitas

# Regression

**Notes**

| | | |
|---|---|---|
| Output Created | | |
| Comments | | |
| Input | Active Dataset | DataSet0 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 37 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics are based on cases with no missing values for any variable used. |
| Syntax | | REGRESSION<br>/MISSING LISTWISE<br>/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA<br>/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)<br>/NOORIGIN<br>/DEPENDENT Y<br>/METHOD=ENTER X<br>/SAVE RESID. |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,02 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,08 |
| | Memory Required | 1356 bytes |
| | Additional Memory Required for Residual Plots | 0 bytes |
| Variables Created or Modified | RES_1 | Unstandardized Residual |

[DataSet0]

**Variables Entered/Removed[a]**

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran Berbasis Kinerja [b] | . | Enter |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. All requested variables entered.

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,984[a] | ,969 | ,968 | 2184737,96583 |

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 6333730716133838,000 | 1 | 6333730716133838,000 | 1326,969 | ,000[b] |
| | Residual | 205242439111009,380 | 43 | 4773079979325,799 | | |
| | Total | 6538973155244443,000 | 44 | | | |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -17454951505,839 | 504397380,355 | | -38,606 | ,000 |
| | Anggaran Berbasis Kinerja | 890279171,301 | 24439694,405 | ,984 | 36,428 | ,000 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

**Residuals Statistics[a]**

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Predicted Value | 902604992,0000 | 956021760,0000 | 919025711,1111 | 11997850,86446 | 38 |
| Residual | -4297798,00000 | 2913202,00000 | -,00001 | 2159768,71190 | 38 |
| Std. Predicted Value | -1,369 | 3,084 | ,000 | 1,000 | 38 |
| Std. Residual | -1,967 | 1,333 | ,000 | ,989 | 38 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

```
NPAR TESTS
  /K-S(NORMAL)=RES_1
  /MISSING ANALYSIS.
```

## NPar Tests

**Notes**

| | | |
|---|---|---|
| Output Created | | |
| Comments | | |
| Input | Active Dataset | DataSet0 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 37 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test. |
| Syntax | | NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=RES_1 /MISSING ANALYSIS. |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,03 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,02 |
| | Number of Cases Allowed[a] | 196608 |

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet0]

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 38 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | -,0000051 |
| | Std. Deviation | 2159768,71189642 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,121 |
| | Positive | ,100 |
| | Negative | -,121 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,812 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,524 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Distribusi Nilai $r_{tabel}$
## Signifikansi 5% dan 1%

| N | The Level of Significance | | N | The Level of Significance | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5% | 1% | | 5% | 1% |
| 3 | 0.997 | 0.999 | 38 | 0.320 | 0.413 |
| 4 | 0.950 | 0.990 | 39 | 0.316 | 0.408 |
| 5 | 0.878 | 0.959 | 40 | 0.312 | 0.403 |
| 6 | 0.811 | 0.917 | 41 | 0.308 | 0.398 |
| 7 | 0.754 | 0.874 | 42 | 0.304 | 0.393 |
| 8 | 0.707 | 0.834 | 43 | 0.301 | 0.389 |
| 9 | 0.666 | 0.798 | 44 | 0.297 | 0.384 |
| 10 | 0.632 | 0.765 | 45 | 0.294 | 0.380 |
| 11 | 0.602 | 0.735 | 46 | 0.291 | 0.376 |
| 12 | 0.576 | 0.708 | 47 | 0.288 | 0.372 |
| 13 | 0.553 | 0.684 | 48 | 0.284 | 0.368 |
| 14 | 0.532 | 0.661 | 49 | 0.281 | 0.364 |
| 15 | 0.514 | 0.641 | 50 | 0.279 | 0.361 |
| 16 | 0.497 | 0.623 | 55 | 0.266 | 0.345 |
| 17 | 0.482 | 0.606 | 60 | 0.254 | 0.330 |
| 18 | 0.468 | 0.590 | 65 | 0.244 | 0.317 |
| 19 | 0.456 | 0.575 | 70 | 0.235 | 0.306 |
| 20 | 0.444 | 0.561 | 75 | 0.227 | 0.296 |
| 21 | 0.433 | 0.549 | 80 | 0.220 | 0.286 |
| 22 | 0.432 | 0.537 | 85 | 0.213 | 0.278 |
| 23 | 0.413 | 0.526 | 90 | 0.207 | 0.267 |
| 24 | 0.404 | 0.515 | 95 | 0.202 | 0.263 |
| 25 | 0.396 | 0.505 | 100 | 0.195 | 0.256 |
| 26 | 0.388 | 0.496 | 125 | 0.176 | 0.230 |
| 27 | 0.381 | 0.487 | 150 | 0.159 | 0.210 |
| 28 | 0.374 | 0.478 | 175 | 0.148 | 0.194 |
| 29 | 0.367 | 0.470 | 200 | 0.138 | 0.181 |
| 30 | 0.361 | 0.463 | 300 | 0.113 | 0.148 |
| 31 | 0.355 | 0.456 | 400 | 0.098 | 0.128 |
| 32 | 0.349 | 0.449 | 500 | 0.088 | 0.115 |
| 33 | 0.344 | 0.442 | 600 | 0.080 | 0.105 |
| 34 | 0.339 | 0.436 | 700 | 0.074 | 0.097 |
| 35 | 0.334 | 0.430 | 800 | 0.070 | 0.091 |
| 36 | 0.329 | 0.424 | 900 | 0.065 | 0.086 |
| 37 | 0.325 | 0.418 | 1000 | 0.062 | 0.081 |

## Distribusi Nilai $t_{tabel}$

| Pr | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| df | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.050 | 0.02 | 0.010 | 0.002 |
| 1 | 1.00000 | 3.07768 | 6.31375 | 12.70620 | 31.82052 | 63.65674 | 318.30884 |
| 2 | 0.81650 | 1.88562 | 2.91999 | 4.30265 | 6.96456 | 9.92484 | 22.32712 |
| 3 | 0.76489 | 1.63774 | 2.35336 | 3.18245 | 4.54070 | 5.84091 | 10.21453 |
| 4 | 0.74070 | 1.53321 | 2.13185 | 2.77645 | 3.74695 | 4.60409 | 7.17318 |
| 5 | 0.72669 | 1.47588 | 2.01505 | 2.57058 | 3.36493 | 4.03214 | 5.89343 |
| 6 | 0.71756 | 1.43976 | 1.94318 | 2.44691 | 3.14267 | 3.70743 | 5.20763 |
| 7 | 0.71114 | 1.41492 | 1.89458 | 2.36462 | 2.99795 | 3.49948 | 4.78529 |
| 8 | 0.70639 | 1.39682 | 1.85955 | 2.30600 | 2.89646 | 3.35539 | 4.50079 |
| 9 | 0.70272 | 1.38303 | 1.83311 | 2.26216 | 2.82144 | 3.24984 | 4.29681 |
| 10 | 0.69981 | 1.37218 | 1.81246 | 2.22814 | 2.76377 | 3.16927 | 4.14370 |
| 11 | 0.69745 | 1.36343 | 1.79588 | 2.20099 | 2.71808 | 3.10581 | 4.02470 |
| 12 | 0.69548 | 1.35622 | 1.78229 | 2.17881 | 2.68100 | 3.05454 | 3.92963 |
| 13 | 0.69383 | 1.35017 | 1.77093 | 2.16037 | 2.65031 | 3.01228 | 3.85198 |
| 14 | 0.69242 | 1.34503 | 1.76131 | 2.14479 | 2.62449 | 2.97684 | 3.78739 |
| 15 | 0.69120 | 1.34061 | 1.75305 | 2.13145 | 2.60248 | 2.94671 | 3.73283 |
| 16 | 0.69013 | 1.33676 | 1.74588 | 2.11991 | 2.58349 | 2.92078 | 3.68615 |
| 17 | 0.68920 | 1.33338 | 1.73961 | 2.10982 | 2.56693 | 2.89823 | 3.64577 |
| 18 | 0.68836 | 1.33039 | 1.73406 | 2.10092 | 2.55238 | 2.87844 | 3.61048 |
| 19 | 0.68762 | 1.32773 | 1.72913 | 2.09302 | 2.53948 | 2.86093 | 3.57940 |
| 20 | 0.68695 | 1.32534 | 1.72472 | 2.08596 | 2.52798 | 2.84534 | 3.55181 |
| 21 | 0.68635 | 1.32319 | 1.72074 | 2.07961 | 2.51765 | 2.83136 | 3.52715 |
| 22 | 0.68581 | 1.32124 | 1.71714 | 2.07387 | 2.50832 | 2.81876 | 3.50499 |
| 23 | 0.68531 | 1.31946 | 1.71387 | 2.06866 | 2.49987 | 2.80734 | 3.48496 |
| 24 | 0.68485 | 1.31784 | 1.71088 | 2.06390 | 2.49216 | 2.79694 | 3.46678 |
| 25 | 0.68443 | 1.31635 | 1.70814 | 2.05954 | 2.48511 | 2.78744 | 3.45019 |
| 26 | 0.68404 | 1.31497 | 1.70562 | 2.05553 | 2.47863 | 2.77871 | 3.43500 |
| 27 | 0.68368 | 1.31370 | 1.70329 | 2.05183 | 2.47266 | 2.77068 | 3.42103 |
| 28 | 0.68335 | 1.31253 | 1.70113 | 2.04841 | 2.46714 | 2.76326 | 3.40816 |
| 29 | 0.68304 | 1.31143 | 1.69913 | 2.04523 | 2.46202 | 2.75639 | 3.39624 |
| 30 | 0.68276 | 1.31042 | 1.69726 | 2.04227 | 2.45726 | 2.75000 | 3.38518 |
| 31 | 0.68249 | 1.30946 | 1.69552 | 2.03951 | 2.45282 | 2.74404 | 3.37490 |
| 32 | 0.68223 | 1.30857 | 1.69389 | 2.03693 | 2.44868 | 2.73848 | 3.36531 |
| 33 | 0.68200 | 1.30774 | 1.69236 | 2.03452 | 2.44479 | 2.73328 | 3.35634 |
| 34 | 0.68177 | 1.30695 | 1.69092 | 2.03224 | 2.44115 | 2.72839 | 3.34793 |
| 35 | 0.68156 | 1.30621 | 1.68957 | 2.03011 | 2.43772 | 2.72381 | 3.34005 |
| 36 | 0.68137 | 1.30551 | 1.68830 | 2.02809 | 2.43449 | 2.71948 | 3.33262 |
| 37 | 0.68118 | 1.30485 | 1.68709 | 2.02619 | 2.43145 | 2.71541 | 3.32563 |
| 38 | 0.68100 | 1.30423 | 1.68595 | 2.02439 | 2.42857 | 2.71156 | 3.31903 |
| 39 | 0.68083 | 1.30364 | 1.68488 | 2.02269 | 2.42584 | 2.70791 | 3.31279 |
| 40 | 0.68067 | 1.30308 | 1.68385 | 2.02108 | 2.42326 | 2.70446 | 3.30688 |